

BAB II

GABARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada penulisan Bab ini penulis akan menjabarkan mengenai daerah tempat penelitian yang akan dilakukan. Pertama sub bab gambaran umum Provinsi Sumatera Barat secara singkat, Profil DPRD Sumatera Barat, LKAAM Sumatera Barat, dan sub bab terakhir akan menjelaskan mengenai budaya matrilineal di Sumatera Barat, yang dalam hal ini bisa diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami penelitian ini.

2.2 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat berada di antara 98°36'–101°53' Bujur Timur dan 0°54' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan. Wilayah ini mencakup daratan seluas sekitar 42.297,30 km² dan perairan laut seluas kurang lebih 186.580 km², dengan panjang garis pantai daratan sekitar 375 km. Jika ditambah dengan garis pantai Kepulauan Mentawai sepanjang 1.003 km, total panjang garis pantai mencapai 1.378 km. Perairan laut di wilayah ini mencakup 375 pulau besar dan kecil.

Gambar 2.1 Peta Administratif Sumatera Barat



(Sumber : Website Pemprov Sumbar 2024)

Ibu kota Sumatera Barat terletak di Kota Padang. Secara administratif, Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten/kota, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan total 179 kecamatan dan 1.160 kelurahan atau nagari. Batas-batas wilayahnya meliputi; sebelah utara berbatasan dengan

Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, serta sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Gambar 2.2 Lambang Provinsi Sumatera Barat



(Sumber : Website Pemprov Sumbar 2024)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023 menunjukkan angka sekitar 5,76 juta jiwa. Angka ini merupakan hasil proyeksi dari Sensus Penduduk 2020. Dimana daerah dengan penduduk yang padat berada di Kota Padang dan daerah dengan penduduk paling sedikit berada di Kota Padang Panjang. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari sekitar 2,90 juta jiwa laki-laki dan 2,86 juta jiwa perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa rasio jenis kelamin di Sumatera Barat berada dalam keseimbangan yang relatif baik, dengan jumlah laki-laki hanya sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Budaya Sumatera Barat, yang dikenal dengan budaya Minangkabau, memiliki ciri khas yang unik karena menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini tercermin dalam pembagian harta pusaka, di mana perempuan memiliki peran penting sebagai pewaris utama. Selain itu, adat Minangkabau mengedepankan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang berarti adat istiadat berlandaskan ajaran Islam. Keunikan budaya Minangkabau yang dinamis, sekaligus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

a. Sejarah Sumatera Barat

Wilayah Sumatera Barat menjadi bagian dari pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, yang menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pada abad ke-14, muncul Kerajaan Pagaruyung, sebuah kerajaan Minangkabau yang berkembang pesat dan dikenal sebagai pusat budaya, agama, dan pemerintahan di Sumatera Barat. Kerajaan ini menerapkan sistem matrilineal dalam masyarakatnya, yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau hingga saat ini.

Islam mulai masuk ke Sumatera Barat sekitar abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah dari pedagang Gujarat dan Aceh. Islam kemudian diterima secara luas oleh masyarakat dan menjadi elemen utama dalam kehidupan sosial dan adat istiadat Minangkabau, menghasilkan perpaduan unik antara adat dan syariat. Pada abad ke-17 hingga 19, wilayah ini menjadi salah satu fokus kolonialisme Belanda. Perlawanan sengit dari rakyat Sumatera Barat terhadap

penjajah ditandai oleh Perang Padri (1821–1837), yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama seperti Tuanku Imam Bonjol. Perang ini mencerminkan konflik internal antara adat dan Islam yang kemudian diselaraskan melalui kesepakatan adat Minangkabau yang selaras dengan ajaran agama

Pada awal abad ke-20, Sumatera Barat menjadi pusat intelektual dan pergerakan nasional. Banyak tokoh penting dalam sejarah Indonesia berasal dari wilayah ini, seperti Mohammad Hatta (proklamator kemerdekaan), Sutan Syahrir, dan Tan Malaka. Kota Padang Panjang dan Bukittinggi menjadi pusat pendidikan dan kegiatan pergerakan nasional, yang melahirkan para pemikir dan pemimpin yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, munculnya organisasi modern seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam semakin memperkuat kesadaran politik dan keagamaan masyarakat Minangkabau

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Sumatera Barat memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, wilayah ini sempat menjadi pusat pemerintahan darurat saat agresi militer Belanda. Dalam dekade berikutnya, Sumatera Barat juga menjadi saksi pergolakan regional melalui pemberontakan PRRI (1958–1961), yang mencerminkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, sejak itu, Sumatera Barat terus berkembang sebagai salah satu provinsi yang dikenal akan kekayaan budaya, pendidikan, dan pariwisata. Hingga kini, nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan Islam tetap menjadi landasan kuat dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi warisan budaya yang membanggakan.

a. Demografi Sumatera Barat

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah di Sumatera Barat

Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan wilayah
	2023
Kabupaten:	-
Kep. Mentawai	91.427
Pesisir Selatan	525.355
Solok	405.375
Sijunjung	243.709
Tanah Datar	383.676
Padang Pariaman	451.388
Agam	551.893
Limah Puluh Kota	396.427
Pasaman	313.199
Solok Selatan	191.540
Dharmasraya	239.918
Pasaman Barat	450.050
Kota	-
Padang	942.938
Solok	77.842
Sawahlunto	67.758
Padang Panjang	58.627

Bukittinggi	124.047
Payakumbuh	144.830
Pariaman	97.206
Sumatera Barat	5.757.205

(Sumber : BPS SUMBAR 2024)

Pada tahun 2023, hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat berdasarkan Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk mencapai 5,76 juta jiwa. Komposisi tersebut terdiri dari 2,90 juta laki-laki dan 2,86 juta perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,52. Angka ini mencerminkan penambahan sekitar 222,74 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2020. Dari segi kepadatan, tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai 136,69 orang per kilometer persegi. Penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023 didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai 67,93 persen dari total populasi. Sisanya, sebesar 32,07 persen, terdiri dari kelompok usia non-produktif, yaitu 24,74 persen pada rentang usia 0-14 tahun dan 7,33 persen pada usia 65 tahun ke atas. Dengan distribusi usia ini, Sumatera Barat masih berada dalam fase *bonus demografi*, yang memberikan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi angkatan kerja. Selain itu, persentase penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) tercatat sebesar 11,36 persen.

b. Sosial Budaya di Sumatera Barat

Masyarakat Sumatera Barat memiliki kekayaan sosial budaya yang sangat kental, yang mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dijaga turun-temurun. Salah satu aspek terpenting dari budaya Sumatera Barat adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak ibu. Dalam kehidupan sosial, adat sangat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Masyarakat Minangkabau, yang menjadi mayoritas di provinsi ini, sangat menghormati prinsip *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, yang berarti adat harus berlandaskan pada hukum agama Islam.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh agama Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual tetapi juga sebagai dasar dalam menjalankan berbagai tradisi sosial. Adanya keunikan dan keragaman budaya di Sumatera Barat terus mempertahankan dan melestarikan tradisi sosial budayanya meskipun ada pengaruh modernisasi. Budaya dalam perkawinan, upacara kematian, hari hari besar ke agamaan, menunjukan masyarakat Sumatera Barat yang bepegang teguh pada tradisi sesuai dengan petuah adat : “*Adat tak lakang dek Paneh, tak lapuak dek hujan*” yang berarti adat tidak akan hilang walau berganti zaman.

c. Pendidikan

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (2024), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)., APM tertinggi di Sumatera Barat tercatat pada jenjang SD/MI, mencapai 98,89 persen. Ini berarti lebih dari 98 persen anak usia 7–12 tahun bersekolah tepat waktu. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk berbagai kelompok umur menunjukkan Kelompok usia 7–12 tahun memiliki APS tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Selain itu Angka Melek Huruf (AMH) juga terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mencapai 99,71 persen, yang artinya dari 10 penduduk 15–64 tahun di Sumatera Barat, 9 penduduk di antaranya bisa membaca dan menulis.

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan di Sumatera Barat 2023 (Persen)

Tingkat Pendidikan	Tahun 2023 (Persen)
Tidak mempunyai Ijazah	12,84
SD/MI	19,41
SMP/MTs	21,74
SMA/SMK/MAK	33,07
Perguruan Tinggi	12,94

(Sumber : Statistik Daerah Provinsi Sumatera Barat 2024)

Salah satu indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan. Data menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Selain itu, penduduk dalam kelompok usia tertentu yang sama telah berhasil menamatkan pendidikan tinggi.

d. Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah daerah Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai ke pelosok. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah fasilitas kesehatan sudah cukup banyak dikutip dari “Sumatera Barat dalam Angka” (BPS 2024), dimana sejak tahun 2023 telah menunjukkan peningkatan dari sebelumnya. Dimana terdapat 50 Rumah Sakit Umum, dan 34.260 tenaga medis yang tersebar di seluruh daerah Sumatera Barat. Dengan Angka Kesakitan 11,84 persen berdasarkan data BPS 2023, dengan didominasi kelompok umur 60 tahun ke atas.

e. Kepariwisata

Bandara Internasional Minangkabau membuka pintu bagi wisatawan domestik bahkan mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat. Para wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Barat berasal dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Australia, Singapura, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Jerman, Jepang, dan India.

Selain itu banyak nya daya tarik wisata di Sumatera Barat yang menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun internasional untuk mengunjungi Sumatera Barat, seperti adanya wisata sejarah seperti Jam Gadang di Bukittinggi,

Danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Jalur menuju Danau Maninjau melalui Kelok 44 menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Serta wisata Istano Baso Pagaruyuang yang menjadi lambang kebudayaan masyarakat Minangkabau.

f. Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan jasa merupakan sektor penting dalam perekonomian Sumatera Barat. Sektor perdagangan didominasi oleh komoditas hasil pertanian seperti padi, kelapa, kopi, kakao, dan gambir, yang tidak hanya dipasarkan secara lokal tetapi juga diekspor ke berbagai negara, termasuk Malaysia dan Eropa. Pasar tradisional seperti Pasar Raya Padang dan Pasar Atas Bukittinggi menjadi pusat aktivitas ekonomi, sementara perdagangan modern mulai berkembang di kawasan perkotaan dengan kehadiran pusat perbelanjaan. Sementara itu, sektor jasa berkontribusi besar melalui pariwisata, transportasi, dan pendidikan. Destinasi wisata unggulan menarik wisatawan domestik dan internasional, didukung oleh layanan transportasi yang terus berkembang, termasuk Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu masuk utama. Selain itu, jasa keuangan dan pendidikan memainkan peran strategis, dengan lembaga seperti Bank Nagari dan Universitas Andalas menjadi pilar penting. Selain itu Sumatera Barat memiliki potensi besar, seperti pengembangan UMKM dan pelabuhan Teluk Bayur untuk menunjang perdagangan dan jasa sebagai pilar perekonomian di Sumatra Barat.

2.3 Profil DPRD Sumatera Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat merupakan lembaga legislatif tingkat provinsi yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja pemerintah provinsi, DPRD Sumbar memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Lembaga ini menjadi wadah representasi politik masyarakat, yang berperan dalam mengartikulasikan aspirasi publik serta memastikan pengelolaan sumber daya daerah dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

DPRD Sumbar menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Fungsi legislasi mencakup pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah provinsi, fungsi anggaran berkaitan dengan penyusunan dan pengawasan APBD, sedangkan fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik. Dengan ketiga fungsi ini, DPRD menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif di tingkat daerah.

Struktur keanggotaan DPRD Sumatera Barat terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pada Pemilu 2024, sebanyak 65 anggota legislatif terpilih untuk periode 2024–2029, mewakili berbagai partai politik yang berkompetisi di tingkat provinsi.

Keberagaman partai politik ini mencerminkan pluralitas masyarakat Sumbar dan memberi warna dalam proses legislasi serta dinamika politik lokal.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD memiliki beberapa alat kelengkapan yang menunjang kerja kelembagaan secara sistematis. Struktur ini terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), serta alat kelengkapan lain yang dapat dibentuk melalui rapat paripurna. Pimpinan DPRD, yang terdiri dari satu ketua dan beberapa wakil ketua, berperan penting dalam memimpin sidang, mengoordinasikan kegiatan kelembagaan, serta menjaga komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

Dalam konteks otonomi daerah, DPRD Sumbar tidak hanya berperan dalam urusan administratif dan ekonomi, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai lokal. Sebagai daerah yang kaya akan budaya dan adat istiadat Minangkabau, DPRD Sumatera Barat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan turut melestarikan warisan budaya lokal. Prinsip-prinsip seperti musyawarah dan mufakat, yang menjadi inti dari falsafah adat Minangkabau, senantiasa dijunjung dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dilakukan tetap berakar pada jati diri daerah.

2.4 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan lembaga adat yang berperan penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Lembaga ini dikenal sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Salah satu peran utamanya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah serta menjadi garda terdepan dalam perlindungan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

LKAAM memiliki struktur kelembagaan yang terorganisasi dari tingkat provinsi hingga ke tingkat terendah, yakni nagari atau desa adat. Di tingkat nagari, lembaga ini dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang juga menjalankan fungsi serupa dalam lingkup yang lebih lokal. Kehadiran KAN di tiap nagari menjamin bahwa nilai-nilai adat tetap hidup dalam keseharian masyarakat, dan menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan adat secara musyawarah sesuai prinsip-prinsip kearifan lokal Minangkabau.

Anggota LKAAM umumnya terdiri dari *niniak mamak*, yaitu para pemangku adat yang memiliki otoritas dalam struktur sosial Minangkabau. Mereka merupakan representasi masyarakat adat yang dipercaya untuk menyuarakan kepentingan komunitas kepada pemerintah daerah. Fungsi LKAAM sebagai jembatan komunikasi ini memungkinkan terjadinya sinergi antara kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau.

Secara umum, LKAAM dapat dikategorikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena aktivitasnya lebih berfokus pada bidang sosial dan budaya, bukan pada ranah politik praktis. Peran non-politik ini mencerminkan komitmen LKAAM dalam menjaga netralitas lembaga adat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya tetap terjaga. LKAAM menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai dasar pembangunan yang berakar pada identitas lokal.

Selain menjaga nilai-nilai adat, LKAAM juga berkomitmen untuk memastikan bahwa warisan budaya Minangkabau dapat diteruskan secara sistematis kepada generasi muda. Melalui pendekatan kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan, LKAAM berperan dalam pendidikan adat, regenerasi kepemimpinan adat, serta pembinaan karakter berdasarkan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, LKAAM tidak hanya menjadi pelestari budaya, tetapi juga aktor penting dalam membentuk masa depan masyarakat Minangkabau yang berakar kuat pada jati dirinya

2.5 Budaya Matrilineal

Sistem matrilineal berawal pada masa kepemimpinan Datuk Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Pada saat itu, wilayah Minangkabau dikenal sebagai daerah yang cinta damai, tidak memiliki angkatan perang atau kepolisian. Situasi ini menarik perhatian Majapahit, yang mengirim panglima perangnya, Adityawarman, untuk menyerang Minangkabau.

Datuk Katumanggungan, yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, berupaya keras mencari cara agar perang dapat dihindari. Saat Adityawarman tiba di Minangkabau, ia disambut bukan dengan peperangan, melainkan dengan keramahan dan tawaran pernikahan dengan Putri Jamilah, adik Datuk Katumanggungan. Selain itu, Adityawarman juga ditawarkan untuk diangkat sebagai raja di Minangkabau jika bersedia menikahi Putri Jamilah. Tawaran ini mengejutkan Adityawarman, namun ia menerimanya demi menghindari konflik.

Demi memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di bawah pengaruh Minangkabau, Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang menetapkan aturan adat baru yang disebut *Batali Bacambua*. Aturan ini mengubah struktur sosial masyarakat Minangkabau: garis keturunan dan pewarisan ditentukan melalui pihak ibu. Anak-anak tidak lagi mewarisi dari ayah, melainkan dari mamak, yaitu saudara laki-laki ibu. Perubahan ini memastikan bahwa keturunan Putri Jamilah tetap menjadi bagian dari garis Minangkabau dan kekuasaan Adityawarman hanya bersifat transisi.

Cerita ini dipercaya sebagai asal-usul sistem matrilineal yang masih dijalankan oleh masyarakat Minangkabau hingga kini. Dalam adat Minangkabau, hak waris dan garis keturunan ditentukan melalui pihak ibu, dan perwalian anak secara adat berada pada mamak, bukan ayah kandungnya. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, peran mamak mulai bergeser. Saat ini, tanggung jawab penuh terhadap anak lebih banyak dipegang oleh ayah, baik sebagai ayah biologis maupun ayah sosial. Perubahan ini mencerminkan

pergeseran nilai-nilai adat dalam keluarga Minangkabau seiring dengan perubahan zaman.

Amri Marzali (2000) dalam bukunya *Masyarakat Minangkabau: Perspektif Antropologi* menyoroti bahwa budaya matrilineal di Minangkabau merupakan warisan adat yang unik dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. Sistem ini menetapkan bahwa garis keturunan, kepemilikan harta pusaka, dan pewarisan gelar adat ditentukan melalui jalur ibu. Menurut Marzali, peran mamak sebagai wali adat dan pengelola harta warisan menjadi simbol dominasi perempuan dalam sistem sosial Minangkabau. Selani itu dijelaskan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau merupakan inti dari struktur sosial masyarakatnya, yang ditandai dengan pewarisan garis keturunan melalui pihak ibu. Sistem ini memberi peran penting kepada mamak (saudara laki-laki ibu) sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab terhadap kemenakannya, sementara ayah berfungsi lebih sebagai ayah biologis.